

# **BAB I**

## **PENDAHULUAAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia dalam reformasi sedang menghadapi tantangan yang berhubungan dengan masalah kecurangan, kolusi, nepotisme, dan penggelapan lainnya. Sehingga dalam proses verifikasi secara objektif yang terdokumentasi secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, dan kondisi, sistem atau informasi tersebut atau sesuai dengan kriteria audit. Serta mengkomunikasikan hasil proses tersebut kepada klien (Iqbal, 2003).

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi merupakan bentuk penipuan yang disengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian. Untuk mengantisipasi adanya kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi didalam suatu pemerintahan/instansi maka diperlukan adanya pengendalian internal. Menurut PP No.60 Tahun 2008 pengendalian internal di perusahaan dibedakan atas pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Ketaatan perundang undangan merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk pengamanan aset negara yang diperoleh merupakan penyerapan anggaran yang berasal dari rakyat untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara merupakan isu yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, jika terdapat kelalaian dalam pengamanan aset negara akan berakibat pada mudahnya terjadi kegiatan penggelapan, pencurian, dan bentuk manipulasi lainnya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia paska reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2009). Kecurangan akuntansi di Indonesia meningkat dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan

negara sampai ke level daerah. Menurut *indonesia corruption watch (ICW)* ada sebanyak 576 korupsi, 1928 tersangka dengan nilai suap sebesar Rp 211 milyardan total kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun, penggelembungan (mark up) dan pungutan liar (pungli) dengan masing masing 77 kasus dan 71 kasus, ICW juga menyebut bahwa melakukan praktek korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara sebesar Rp 1,17 triliun. Hal ini menunjukkan kasus korupsi di keuangan daerah masing masing tergolong cukup tinggi (HIPSI, 2018).

Korupsi adalah ancaman serius, terutama di lampung sendiri dimana banyak dari sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari eksekutif hingga legislatif dan pemerintah daerah hingga pusat tak luput dari pelaksanaan tindak korupsi. Sehingga pada akhir akhir ini komisi pemberantasan korupsi gencar untuk melakukan penyelidikan serta pengungkapan kasus terkait korupsi yang ada di provinsi lampung. Kasus yang baru saja mencuat di wilayah provinsi lampung yaitu dimana sudah tercatat sebanyak lima bupati dan beberapa pegawai negeri sipil yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana bupati atau kepala daerah yang terkena kasus korupsi di provinsi lampung diantara lain bupati yang terjerat kasus korupsi yaitu bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Bupati Lampung Utara yaitu Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, Serta Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dan juga terungkapnya kasus 7 Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesawaran terjerat kasus korupsi, tidak hanya itu pada tahun 2018 ada kasus terkait OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi dilingkungan pemerintah kabupaten pesawaran, dimana kasus tersebut berjenis pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten pesawaran. Dengan adanya kasus korupsi dan sebagainya di indonesia dan di wilayah lampung ini menyebabkan banyak kerugian dana daerah, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan (RRI.co.id).

Dengan hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah sesuatu kasus yang menjadi permasalahan kecurangan terbesar yang terjadi di Indonesia. Kecurangan telah menarik perhatian media dan menjadi isu-isu yang menonjol. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut. Di Indonesia kecurangan akuntansi meningkat karena adanya desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan level daerah. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2020 tercatat ada 169 kasus korupsi sepanjang semester satu periode 1 Januari hingga 30 Juni. Dari 169 kasus korupsi yang dididik oleh penegak hukum, 139 kasus di antaranya merupakan kasus baru. Diduga korupsi dana BOS 153 juta dan 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan (OTT). Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 Triliun (Kontan.co.id, 2020). Di Lampung sendiri tindakan kecurangan sering terjadi salah satunya di Kabupaten Pesawaran yaitu kasus korupsi yang terjadi di RSUD Pesawaran yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus PNS dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran dan konsultan proyek (lampost.co, 2020).

Di pemerintahan Kabupaten tersendiri terlihat adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Dimana pemerintah Kabupaten Pesawaran meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK atau Badan Pemerikasaan Keuangan RI perwakilan Lampung ([www.pesawarankab.go.id](http://www.pesawarankab.go.id)). Kecenderungan terlihat dimana Pemkab Pesawaran memiliki status WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK namun masih adanya kecurangan yang terjadi di dalam sebuah instansi atau pemerintah Kabupaten Pesawaran, ini pun mendasari adanya keinginan untuk melaksanakan penelitian dan melakukan observasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa tindak kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam

definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Arie, 2008). Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang ditimbulkan dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang diakibatkan dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan *Fraud Triangle Theory* faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan ada 3 yaitu: kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Kesempatan atau peluang adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan (Tuanggal, 2011). Menurut Dewi (2014), Faktor ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi), nilai (*values*) dan karena dorongan keserakahan adalah beberapa hal yang menimbulkan tekanan untuk melakukan *fraud*. Rasionalisasi merupakan bagian *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Rasionalisasi ditunjukkan saat pelaku pencarian pembenaran sebelum melakukan kejahatan bukan sesudah melakukan tindakan tersebut (Dewi, 2014). Selain *Fraud Triangle Theory*, *GONE Theory* juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan tindak kecurangan. Menurut Bologna dalam Lisa (2013), *GONE Theory* memiliki empat komponen yaitu *Greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan), *Exposures* (pengungkapan).

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah moralitas individu. Menurut Bertens (1993), moralitas dari kata

sifat latin *moralis* mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita bicara tentang moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Semakin buruk moralitas dari seseorang maka peluang terjadinya tindak kecurangan akan semakin besar. Moral yang buruk di definisikan dapat mendorong individu bertindak tidak etis dan melakukan tindak kecurangan akuntansi. Semakin manusia tidak memiliki moral semakin memungkinkan terjadinya kecurangan dalam suatu hal.

Berdasarkan hasil penelitian Udayani (2017) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis.

Religiusitas juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai religiusitas tinggi mereka tidak akan melakukan tindak kecurangan karena apa yang mereka lakukan akan bertentangan dengan ajaran agama yang mereka peluk. Menurut Rohayati (2014) yang mengatakan bahwa religiusitas seseorang dapat berpengaruh terhadap kinerja mereka didalam perusahaan. Sikap religiusitas yang dimiliki setiap individu, akan menjadi batasan dalam menjalankan persaingan dalam dunia kerja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi (2018) bahwa religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain faktor moralitas individu, religiusitas, kecurangan akuntansi dapat terjadi karena adanya efek pengamat (*bystander effect*), yaitu seseorang yang mengetahui suatu peristiwa adanya tindak kecurangan tetapi orang tersebut memilih untuk diam dan dengan sengaja membiarkannya atau tidak ingin ikut campur atau terlibat dalam kasus tersebut, yang nantinya dapat mempengaruhi atau membuat posisi dirinya bekerja akan terganggu.

*Bystander effect* adalah fenomena sosial dibidang psikologi dimana semakin besar jumlah orang yang ada disebuah tempat kejadian, akan semakin kecil kemungkinan orang-orang tersebut membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi darurat ditempat kejadian itu (Sarwono, 2009). Dalam kasus *Bystander effect* atau efek pengamat merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui adanya tindak kecurangan tetapi memilih diam dan dalam dirinya sengaja memberikannya atau tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut, yang dapat membuat posisi dirinya bekerja akan terganggu. Berdasarkan hasil penelitian Dewi (2018) menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan.

Pengendalian Internal yang terdiri atas lima dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan merupakan dasar bagi keseluruhan sistem pengendalian intern, dimana lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan dalam kegagalan efektifitas unsur sistem pengendalian intern lainnya (Arens, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Arens (2014) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian (Gunayasa, 2020) dan penelitian dari (Udayani, 2017). Penelitian ini mengacu pada penelitian (Gunayasa, 2020) yang berjudul “Pengaruh Moralitas Individu, Religiusitas, Dan *Bystander Effect* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi *Fraud* (studi empiris pada LPD se-kecamatan marga)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel “Pengendalian Internal” yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Udayani, 2017) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Moralitas Individu, Religiusitas, *Bystander Effect* dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (studi kasus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, Lampung)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moralitas Individu, Religiusitas, *Bystander Effect*, dan Pengendalian Internal sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pesawaran dengan periode penelitian tahun 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
2. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
3. Apakah *Bystander Effect* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk membuktikan menguji secara empiris pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar dapat mengaplikasikan variabel-variabel independen sebagai upaya mencegah terjadinya suatu kecurangan yang terjadi di pemerintah daerah.

2. Manfaat Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**



Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, referensi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulisan berdasarkan hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**